

ABSTRAK

DAMPAK PERUBAHAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA

Selvi Dwi Anita, Rusli Pandika

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai dampak setelah berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata dan perubahan peran Notaris setelah berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 tahun 2018 tentang Pendafatan Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penulis telah melakukan penelitian pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Dampak setelah berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata terhadap pengaturan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata adalah munculnya kewajiban untuk mendaftarkan pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diawali dengan pengajuan nama di Sistem Administrasi Badan Usaha. Pendaftaran yang dilakukan adalah pendaftaran akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran artinya Notaris selaku pejabat yang berwenang membuat akta otentik memiliki kewajiban untuk membuat akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan akta pembubaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata dan mendaftarkannya ke dalam SABU.

Kata Kunci: CV, Firma, dan Persekutuan Perdata, Notaris, Kewenangan Notaris.

ABSTRACT

Selvi Dwi Anita, Dr. Rusli Pandika, S.H.,LL.M

This research was conducted to identify and assess the impact after the enactment of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 17 of 2018 concerning Registration of Military Partnership, Firm Alliance, and Civil Alliance and changes in the role of the Notary after the enactment of the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 17 of 2018 concerning Registration of the Limited Partnership, Firm Alliance, and Civil Alliance

This research was conducted using normative legal research methods. The author has conducted research on written regulations so that this research is very closely related to the library because it will require secondary data on the library.

The impact after the enactment of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 17 Year 2018 regarding the Registration of the Limited Partnership, Firm Alliance, and Civil Alliance on the regulation of CV, Firm, and Civil Alliance is the emergence of the obligation to register the establishment, amendment to the articles of association and dissolution of CV, Firm and Civil alliance through the Business Entity Administration System (SABU) owned by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, which begins with the filing of a name in the SABU. Registration that is carried out is the registration of the deed of incorporation, amendment to the articles of association, and dissolution means that the Notary as the official in charge of making authentic deed has the obligation to make the deed of incorporation, amendment to the articles of association, and deed of dissolution of the limited partnership, firm alliance, and civil alliance and register it into the SABU..

Keywords: Limited Partnership, Firm Alliance, and Civil Alliance, and the Alliance of Civil, Notary, Notary Authority.